

## **BAB III**

### **DINAMIKA POLITIK LOKAL**

#### **A. Kondisi obyektif**

##### **1. Gambaran Umum Kota Tangerang**

Pembangunan Kota Administratif Tangerang secara makro berpijak pada kebijaksanaan pembangunan berdasarkan prioritas tahapan Repelita dimulai sejak Pelita I sampai dengan Pelita V. Selain bertitik tolak dari prioritas tersebut, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penarik diantaranya berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Kota Tangerang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten, pesatnya pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan dapat memperbaiki kualitas kehidupan, masih banyak tersedianya sumber daya alam sehingga dapat menarik investor yang dapat menyerap lapangan kerja baru.

Sedangkan dalam lingkup Jabotabek sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976, Tangerang termasuk wilayah pengembangan Jabotabek yang dipersiapkan untuk mengurangi ledakan penduduk DKI Jakarta, mendorong kegiatan perdagangan dan industri yang berbatasan dengan DKI Jakarta, mengembangkan pusat-pusat pemukiman dan mengusahakan keserasian pembangunan antara DKI Jakarta dengan daerah yang berbatasan langsung.

Pertumbuhan penduduk Kota Administratif Tangerang melaju begitu tinggi. Hal ini terlihat pada data yang dituangkan dalam Rencana Umum Kota Tangerang (Perda Nomor 4 tahun 1985) Kota Administratif Tangerang dapat menampung 850.000 jiwa. Menurut sensus tahun 1990 penduduk Kota Administratif Tangerang telah mencapai 921.848 jiwa.

Lonjakan jumlah penduduk disebabkan terutama karena kedudukan dan peranan Kota Tangerang sebagai daerah penyangga DKI Jakarta (hinterland city). Sebagai konsekuensinya, Kota Administratif Tangerang menjadi konsentrasi wilayah pemukiman penduduk dan menjadi tempat kegiatan perdagangan terutama pada sektor industri. Perkembangan sektor perdagangan dan industri di kawasan ini memancing derasnya arus imigrasi sirkuler penduduk. Dilihat dari pertumbuhan penduduk dan dibandingkan dengan jumlah penduduk beberapa Kotamadya di Jawa Barat, Kota Administratif Tangerang jauh lebih tinggi.

Perkembangan perekonomian pada tahun 1989/1990, nilai investasi dari PMA dan PMDN mencapai US \$ 1.191.585.352,00 dan nilai Non Fasilitas Industri Kecil Formal berjumlah Rp. 12.860.551.553,99. Perkembangan tersebut didorong pula oleh perkembangan wilayah yakni dengan adanya Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta dan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Toll, Access Road).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Administratif Tangerang pada tahun 1991/1992 mencapai Rp. 7.066.500.536,00 dan untuk Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) sebesar Rp. 3.284.847.747,74 serta PBB kawasan bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp. 1.900.000.000,00.

Melihat indikator pertumbuhan kota dengan faktor pengaruh yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor), menurut pengelolaan serta pengendalian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik. Dalam hal ini seyogyanya Kota Administratif Tangerang dikembangkan menjadi daerah otonom.

## 2. Kondisi Geografis

Letak Kota Tangerang Secara geografis Kota Tangerang terletak pada posisi 106 36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS).

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug (8,769 Km<sup>2</sup>), Larangan (9,611 Km<sup>2</sup>), Karang Tengah (10,474 Km<sup>2</sup>), Cipondoh ((17,91 Km<sup>2</sup>), Pinang (21,59 Km<sup>2</sup>), Tangerang (15,785 Km<sup>2</sup>), Karawaci (13,475 Km<sup>2</sup>), Jatiuwung (14,406 Km<sup>2</sup>), Cibodas (9,611 Km<sup>2</sup>), Periuk (9,543 Km<sup>2</sup>), Batuceper (11,583 Km<sup>2</sup>), Neglasari (16,077 Km<sup>2</sup>), dan Benda (5,919 Km<sup>2</sup>), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

### 3. Demografi

Tangerang juga memiliki jumlah komunitas Tionghoa yang cukup signifikan, banyak dari mereka adalah campuran Cina Benteng. Mereka didatangkan sebagai buruh oleh kolonial Belanda pada abad ke 18 dan 19, dan kebanyakan dari mereka tetap berprofesi sebagai buruh dan petani. Budaya mereka berbeda dengan komunitas Tionghoa lainnya di Tangerang ketika hampir tidak satupun dari mereka yang berbicara dengan aksen Mandarin,

mereka adalah pemeluk Taoisme yang kuat dan tetap menjaga tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat komunitas mereka. Secara etnis, mereka tercampur, namun menyebut diri mereka sebagai Tionghoa. Banyak makam Tionghoa yang berlokasi di Tangerang, kebanyakan sekarang telah dikembangkan menjadi kawasan sub-urban seperti Lippo Village.

Kawasan pecinan Tangerang berlokasi di Pasar Lama, Benteng Makassar, Kapling dan Karawaci (bukan Lippo Village), dan Poris. Orang-orang dapat menemukan makanan dan barang-barang khas China. Lippo Village adalah lokasi permukiman baru. Kebanyakan penduduknya adalah pendatang, bukan asli Cina Benteng.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Kota Tangerang sangat strategis karena berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Kedudukan geostrategis Kota Tangerang tersebut telah mendorong bertumbuh kembangnya aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian dari Kota Tangerang.

Pendapatan Kota Tangerang pada tahun 2012 di targetkan Rp. 2.003.183.730.952,41 dengan realisasi Rp. 2.188.913.825.554,00 yang terdiri dari PAD Rp. 461.383.233.872,66 dengan realisasi 631.519.353.723,00, dana perimbangan ditargetkan Rp. 1.038.314.546.121,00 dengan realisasi Rp. 1.069.716.222.828,00.

Pendapatan Kota Tangerang pada tahun anggaran 2013 ditargetkan sebesar 2,283 Triliun rupiah, terealisasi sebesar 1,118 triliun rupiah pada triwulan II terdiri dari PAD ditargetkan sebesar Rp.563.108.410.987,00 dengan realisasi Rp. 363.317.489.168,00, dana perimbangan ditargetkan Rp. 1.211.848.034.034.032,00 dengan realisasi Rp.589.268.277.264,00, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp. 508.026.0402.000,00 dengan realisasi Rp/ 165.831.982.756,00.<sup>1</sup>

#### 5. Kependudukan Kota Tangerang

Kependudukan di Kota Tangerang setiap tahun mengalami peningkatan, terhitung dari tahun 2009-2012.

#### kependudukan Kota Tangerang<sup>2</sup>

No	Tahun	Laki-laki	Wanita	Jumlah Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan jiwa
1	2009	805.415	766.407	1.571.822	164.55	9.552
2	2010	863.041	817.590	1.680.631	164.55	10.213
3	2011	969.367	914.390	1.883.757	164.55	11.448
4	2012	1.040.677	990.617	2.031.294	154.55	12.345

Sumber: BPS Kota Tangerang

## B. Dinamika Pemilihan Umum

### 1. Pemilu Legislatif Kota Tangerang 2004

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Tangerang (LKPJ AMJ Walikota Tangerang 2008-2013).

Pemilu di kota Tangerang 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, yang memperebutkan 45 kursi.<sup>3</sup>

Perolehan Suara Partai Politik di DPRD  
Kota Tangerang Tahun 2014

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Presentasi
1	GOLKAR	9	20%
2	PKS	7	15,5%
3	DEMOKRAT	7	15,5%
4	PDIP	5	11,1%
5	PPP	5	11,1%
6	PAN	5	11,1%
7	PKB	2	4,4%
8	PBR	2	4,4%
9	PBB	2	4,4%
10	PPDK	1	2,2%

Sumber: KPUD Kota Tangerang

Dari hasil rekapitulasi bahwa partai Golkar merupakan partai pemenang Pemilu di Kota Tangerang pada tahun 2004 dengan perolehan kursi di DPRD sebanyak 9 kursi, diikuti oleh PKS dan Demokrat 7 kursi,

---

<sup>3</sup> Hasil rekapitulasi perolehan suara KPUD Kota Tangerang

PDIP, PPP dan PAN 5 kursi, PKB, PBR dan PBB 2 kursi, serta PPKD dengan 1 kursi.

## 2. Pemilu Legislatif Kota Tangerang Tahun 2009

Pada pemilu legislatif 9 April 2009 ada 38 partai politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh, partai politik yang mengikuti pemilu legislatif yang akan merebutkan 50 kursi di DPRD tingkat II di Kota Tangerang.

### Perolehan Kursi Partai politik di DPRD kota Tangerang 2009-2014<sup>4</sup>

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Presentase
1	Partai Demokrat	13	26%
2	Partai Golkar	6	12%
3	PKS	6	12%
4	PPP	5	10%
5	PDIP	5	10%
6	Partai Gerindra	5	10%
7	PAN	4	8%
8	PKB	3	6%
9	Hanura	2	4%
10	PKNU	1	2%

Sumber: KPUD Kota Tangerang

---

<sup>4</sup> Rekapitulasi KPUD Kota Tangerang, Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009



Dalam pemilihan legislatif 2009 menepatkan Partai Demokrat sebagai pemenang legislatif di Kota Tangerang pada thun 2009 dengan perolehan 13 kursi. Jika dilihat dari koalisi partai politik kemenangan. Pasangan Arief-Sachrudin didukung 21 kursi, Partai Demokrat 13 Kursi, Gerindra 5 kursi, dan PKB 3 kursi.

### 3. Pemilu Kota Legislatif Kota Tangerang Tahun 2014

Sesuai dengan rapat pleno pemilihan legislatif di Kota Tangerang Pada Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang sah dalam pemilu anggota DPRD kota Tangerang ada 15 partai politik, yaitu: Partai Nasdem dengan Perolehan 45.469 suara, PKB 54.835 suara, PKS 55.284 Suara, PDIP 166.688 suara, Golkar 118.025 suara, Gerindra 102.637 Suara, Demokrat 57.489 suara, PAN 53.479 suara, PPP 73.896 suara, Hanura 50.318 suara, PBB 5.943 suara, PKPI 6.966.

#### Hasil suara sah pemilihan legislatif Kota Tangerang Tahun 2014

No	Partai politik	Suara Sah	%
1	NasDem	45.469	5,75%
2	PKB	54.835	6,95%
3	PKS	55.284	6,99%
4	PDIP	166.688	21,07%

5	GOLKAR	118.025	14,92%
6	GERINDRA	102.637	12,98%
7	DEMOKRAT	57.489	7,27%
8	PAN	53.479	6,76%
9	PPP	73.896	9,34%
10	HANURA	50.318	6,36%
11	PBB	5.943	0,75%
12	PKPI	6.966	0,88%

Sumber: KPUD Kota Tangerang

Dengan hasil perolehan suara maka PDIP sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif dikota tangerang dengan memperoleh 10 kursi.

Hasil Jumlah Kursi pemilihan legislatif  
Kota Tangerang Tahun 2014

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	%
1	NasDem	2	4,00%
2	PKB	5	10,00%
3	PKS	4	8,00%
4	PDIP	10	20,00%
5	GOLKAR	6	12,00%
6	GERINDRA	6	12,00%
7	DEMOKRAT	5	10,00%

8	PAN	4	8,00%
9	PPP	5	10,00%
10	HANURA	3	6,00%
11	PBB	-	0,00%
12	PKPI	-	0,00%
<b>Total</b>		50	

Sumber: KPUD Kota Tangerang

#### 4. Pemilu Provinsi Banten 2009

Didalam pemilihan umum tahun 2009 DPRD Provinsi Banten dibagi menjadi 3 dapil, dapil 1, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dapil 2, Kabupaten Serang,, Kota Serang dan Kota Cilegon, dapil 3, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. pemilu di Provinsi Banten di ikuti oleh 44 Partai politik, tetapi yang mendapat kursi di parlemen hanya 7 partai politik.

Hasil rekapitulasi perhitungan suara sah partai politik peserta pemilihan umum di Provinsi Banten yang mendapatkan kursi di parlemen yaitu, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, PPP, PDIP, Partai Demokrat.

Rekapitulasi perolehan suara dan jumlah kursi  
Pemilihan legislatif di Provinsi Banten Tahun 2009

No	Partai politik	Suara sah	Kursi	%
1	HANURA	167,709	1	4.20
2	GERINDRA	188,689	2	4.72
3	PKS	442,275	3	11.07
4	GOLKAR	574,604	4	14.38
5	PPP	346,065	3	8.66
6	PDIP	401,960	3	10.06
7	DEMOKRAT	903,890	6	22.62

Sumber: KPUD Kota Tangerang

Dari hasil tabel di atas yaitu total keseluruhan dari perolehan suara di 3 dapil, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang.

#### 5. Pemilihan Legislatif DPR RI

Pemilu untuk memilih anggota DPR pada tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal; 9 April 2009, diikuti oleh 38 Partai Nasional dan 6 Partai Politik lokal di Aceh.<sup>5</sup> Hasil perolehan suara dan kursi DPR secara nasional. Secara umum Partai Politik yang mendapatkan kursi di Parlemen adalah

---

<sup>5</sup> KPU RI dari <http://www.kpu.go.id/>

Perolehan suara legislatif  
pemilihan DPR RI Tahun 2009

No	Partai Politik	Suara	%	Kursi
1	HANURA	2.925.620	3,77	17
2	GERINDRA	4.642.795	4,46	26
3	PKS	8.204.946	7,89	57
4	PAN	6.273.462	6,03	46
5	PKB	5.146.302	4,95	28
6	GOLKAR	15.031.497	14,45	106
7	PPP	5.544.332	5,33	38
8	PDIP	14.576/388	14,01	94
9	DEMOKRAT	21.655.295	20,81	148

Sumber: KPU RI

Dapat dilihat bahwa partai Demokrat pemenang atas perolehan suara dan kursi pada pemilihan DPR RI dengan memperoleh 21.655.295 suara dengan jumlah presentase 20.81%, 148 kursi di parlemen.

#### 6. Pemilihan Presiden 2009

Setelah pemilihan presiden tahun 2004 di menangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla, pada pemilihan Presiden tahun 2009 SBY yang menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden yang berpasangan dengan Boediono.

Didalam pemilihan presiden 2009 di ikuti oleh para elit partai politik yang menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden, no urut 2. SBY-Boediono di usung oleh Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS dan PAN, no urut 1. Megawati-Prabowo diusung oleh Partai Gerindra dan PDIP, dan no urut 3 Jusuf Kala (JK)-Wiranto diusung Partai Golkar dan Hanura.

Jusuf kala pada tahun 2004 mendampingi SBY pada tahun 2009 Jk menjadi lawan politiknya untuk maju di pemilihan presiden. SBY-Boediono yang diusung 5 partai politik menamakan dengan koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

Hasil perolehan suara pemilihan umum  
presiden dan wakil presiden tahun 2009<sup>6</sup>

No	Nama Calon	%	Suara	Partai Politik
1	Megawati-Prabowo	26,79	32.548.105	PDIP, Gerindra
2	SBY-Boediono	60,80	73.874.562	Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN
3	JK-Wiranto	12,41	15.081.814	Golkar-Hanura

Dari hasil perolehan suara bahwa pasangan SBY-Boediono sebagai Presiden dan wakil Presiden priode 2009-2014. SBY pada Pemilu tahun 2004 memenangkan kini kembali menjadi Presiden untuk ke 2 kalinya.

<sup>6</sup> KPU RI dari <http://www.kpu.go.id/>

### C. Dinamika Pemilihan Umum

#### 1. Pemilihan Kepala Daerah Walikota Tangerang 2008

Pada tahun 2008 pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan pemilihan langsung. Terdapat 3 pasangan calon yaitu, no urut 1. Wahidin Halim-Arief R Wismansyah yang diusung 10 Partai Politik, no urut 2. H. Bonie Mufidjar-Diedy Faried yang diusung oleh Partai Keadilan Sosial (PKS), dan no urut 3. Ismet Sadeli Hasan-KH. Machfud Abdullah yang melalui jalur perseorangan.

Data pemilihan umum (DPT) sebanyak 668.670 orang dengan jumlah 2.273 TPS. Berdasarkan hasil rekapitulasi peroleha suara pilkada Kota Tangerang pada 30 Oktober 2008.<sup>7</sup>

Rekapitulasi perolehan suara  
Pilkada Kota Tangerang Tahun 2008

No	Calon	Pasangan	Koalisi Partai	suara	%
1	Wahidin Halim	Arief R Wismansyah	Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PPP, PAN, PBB, PBR, PDS, PP, dan PKPB	576.894	88,22

<sup>7</sup> Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara KPU Kota Tangerang.

	H. Bonie Mufidjar	Diedy Faried	PKS	64.741	9,90
	Ismet Sadeli Hasan	KH. Machmud Abdullah	Jalur Perseorangan	12.309	1,88

Sumber: KPUD Kota Tangerang

Dalam perolehan suara tersebut maka no urut 1, Wahidin Halim-Arief memenangkan ajang pilkada Kota Tangerang tahun 2008 dengan memperoleh 576.894 suara atau 88,22%, Bonie-Diedy memperoleh 64.741 suara atau 9,90% dan Ismet-Machmud memperoleh 12.309 suara atau 1,88%.

Jika melihat jumlah kursi yang ada di DPRD, No urut1. Didukung oleh 82,2%, No urut 2. Didukung 15,5% , dan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada di Kota Tangerang adalah 72%..

## 2. Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Banten 2009

Pemilihan kepada daerah di Provinsi Banten dilaksanakan pada 30 Oktober 2011, dengan Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) 7,118,587 di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Pada pilkada terdapat 3 pasangan calon yaitu no urut 1. Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE-H. Rano Karno, no urut 2. Drs. H. Wahidin Halim, M.Si-Hj. Irba Barulita, SE.,MM, no urut 3. H.Jazuli Juwaini, MA-Drs. H. Makmun Muzakki R.



Dari hasil rekapitulasi perolehan suara no urut 1 menang telak di 8 Kabupaten/kota dengan hasil suara 2.136.035, no urut 2. 1.674,957, no urut 3. 491, 432 suara. Maka pasangan no urut 1 Hj.Ratu Atut Chosiyah, SE-H. Rano Karno memangkan pilkada di Provinsi Banten. Ratu Atut-Rano karno diusung 11 Partai di antara lain Partai Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PBB, PPNUI, PKPB, PDS, PPD. Yang memiliki 49 kursi di parlemen.<sup>8</sup>

#### **D. Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Pada Tahun 2013**

##### 1. Proses Tahapan Pencalonan

###### a) Partai Demokrat

Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik yang lahir pada tanggal 9 september 2001. Partai Demokrat berasaskan pancasila dan mengusung ideologi nasionalis-religius, sebuah jalan tengah antara blok nasionalisme dan blok agama, humanisme dan pluralisme, serta demokrasi.

Ideologi nasionalisme religius partai demokrat tersebut ditunjang dengan doktrin tri pakca gatra praja sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan partai. Dalam anggaran dasar partai demokrat pada pasal 4 doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau

---

<sup>8</sup> Suara Pembaruan, <http://sp.beritasatu.com/home/kpu-banten-tetapkan-tiga-pasangan-calon-gubernur/10708>.

tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam membangun bangsa dan Negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.<sup>9</sup>

Kesesuaian doktrin dan ideologi dari partai demokrat tercantum dalam bentuk lambang partai. Partai demokrat sendiri memiliki lambang yang berupa gambar bintang tiga yang bersinar tiga arah dengan warna merah putih, bintang bersegitiga berwarna merah putih tersebut memiliki makna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan yakni:

- 1) Nasionalisme religious, yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus bermoral agama
- 2) Humanisme, yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bagian integral dari masyarakat dunia
- 3) Pluraisme, yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha Esa,

---

<sup>9</sup> AD/ART Partai Demokrat, BAB I Nama Dan Kedudukan, Asas, Ideologi, Doktrin, Etika, Dan Ciri, Pasal 4 Ayat (2)

serta keberadaan cirri khas setiap daerah yang menyatu sebagai bangsa indoneisa.<sup>10</sup>

Didalam visi dan Misi Partai, dalam Visinya Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang meredeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, Humanisme, dan Internasionalisme, atas dasar ketaqwaan kepada tuhan yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera. Adapun Misi partai Demokrat yaitu

- 1) Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke dalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri dan pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

---

<sup>10</sup> AD/ART Partai Gerindra, BAB III Atribut Partai, Pasal 10 ayat (2)

- 2) Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasigenerasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
- 3) Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.<sup>11</sup>

Dalam tahapan proses pencalonan DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Merujuk pada Petunjuk Pelaksana (Juklak) yang membahas tentang mekanisme penjaringan calon, dalam mekanismenya yang pertama dilakukan partai Demokrat adalah

- 1) Persiapan

---

<sup>11</sup> AD/ART Partai Demokrat Pasal 7-8

Pada tahap Persiapan ini yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat adalah membentuk sebuah tim yang bertugas sebagai penjaring dan penyaring.

2) Interview

Interview ini dilakukan oleh ketua DPC dan Sekretaris DPC, dan ketua komisi pemenangan pemilihan umum cabang kepada bakal calon kepala daerah

3) Ketokohan

4) Tes Psikologi

Tes psikologi ini dilakukan oleh tim 7 kepada bakal calon kepala daerah.

5) Fit and Proper Test

Fit and proper test ini dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang kepada bakal calon Kepala daerah.<sup>12</sup>

b) Partai Gerindra

Partai Gerindra lahir dari jerit kemeratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Pada tanggal 6 february 2008 partai Gerindra lahir dan di pelopori oleh Prabowo Subianto. Dalam partai Gerindra termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia

---

<sup>12</sup> 04/Juklak/DPP.PD/VII/2013

yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta beradab dan berkebutuhan yang berlandaskan Pancasila.

Adapun Visi dan Misi Partai Gerindra yang tercantum dalam AD/ART adalah menjadi partai yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Selanjutnya Misi Partai Gerindra adalah

- 1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing.
- 3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

- 4) Menegakan supermasi hukum dengan mengedepankan praduka tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum.
- 5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui pemilu legislatif dan pemilu presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat.

DPC Partai Gerindra di dalam BAB VI tentang kewajiban dan hak anggota di pasal 22 bahwa salah satu kewajiban dan hak anggota, pimpinan cabang adalah mengajukan calon bupati/walikota dan calon wakilnya dari partai gerindra kepada dewan pimpinan daerah atas persetujuan dewan pimpinan pusat.<sup>13</sup>

Dalam hal penjaringan calon Partai Gerindra memberikan persyaratan kepada siapa saja yang ingin mencalonkan kepala daerah dan ingin didukung oleh Partai Gerindra. Persyaratan itu adalah

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
- 3) Bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia

---

<sup>13</sup> Ad/art Partai Gerindra

- 5) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah (SMA), diutamakan Sarjana (S1).
- 6) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- 7) Patuh dan taat pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga manifesto perjuangan dan peraturan-peraturan serta ketetapan Partai Gerindra
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara (lima) tahun atau lebih.
- 9) Sehat jasmani dan rohani
- 10) Terdaftar sebagai pemilih.

Adapun proses tahapan rekrutmen dalam penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Partai Gerindra dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan oleh bakal calon kepala daerah dengan mendatangi kantor DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, calon yang ingin mendaftar menyerahkan foto



kopi kartu tanda penduduk warga Negara Indonesia, menyerahkan CV (curriculum vitae), menyerahkan bukti kelulusan pendidikan terakhir

2) Interview

Pada tahap interview calon yang telah mendaftar akan di interview oleh ketua DPC Partai, Sekretaris Partai. dengan adanya tahap interview ini dapat melihat dan menimbang kualitas dan kapabilitas dari calon

3) Ketokohan

Ketokohan dapat dilihat dari biodata atau formulir yang diserahkan untuk pendaftaran.

4) Survei

Survei ini dilakukan untuk menilai popularitas serta dukungan masyarakat terhadap calon.

5) Tahap Penetapan calon

Tahap pencalonan kepala daerah dilakukan melalui rapat kerja partai Gerindra, yang dilalukan oleh DPC Partai, tahapan ini untuk menyaring bakal calon yang telah di verifikasi. Kputusan untuk menetapkan calon dilakukan oleh DPP Gerindra.

Dalam hal seleksi bakal calon kepala daerah Partai Gerindra terdapat beberapa tahap yaitu:

- 1) Bakal calon yang sudah mendaftar kepada DPC dengan tembusan DPD dan DPP
- 2) DPC dan DPD melakukan verifikasi administratif bakal calon kepala daerah dan menyerahkan berkas pendaftaran kepada DPP
- 3) DPP menyerahkan proses seleksi kepada badan seleksi bakal calon di pusat
- 4) Badan seleksi bakal calon di pusat menyeleksi dan menyerahkan hasil penilaian bakal calon kepala daerah kepada DPP
- 5) DPP menetapkan nama bakal calon kepala daerah yang didukung dengan satu paket tim supervise pilkada
- 6) Tim supervise pilkada melakukan asistensi dan supervisi dan supervise pemegang kepada bakal calon kepala daerah.<sup>14</sup>

c) Partai PKB

Lahirnya Partai kebangkitan Bangsa didasari atas usulan warga Nahdatul Ulama (NU) diseluruh pelosok tanah air. Visi PKB yaitu mewujudkan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia

---

<sup>14</sup> No. 01/Juklak/BSBCKD-DPP Gerindra/2009.

sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan seperitual. Didalam Misi PKB tercantum 7 bidang, diantara Misi 7 bidang itu yaitu:

- 1) Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera.
- 3) Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis
- 4) Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

- 5) Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- 6) Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.
- 7) Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Didalam petunjuk pelaksana (Juklak) di bahas mekanisme pelaksanaan proses pencaringan yang diperuntungkan bagi para fungsioner, anggota, kader dan simpatisan adar bias mengetahuinya secara jelas criteria calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain:

---

<sup>15</sup> AD/ART PKB

- 1) Kader/anggota partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
- 2) Simpatisan/nin kader partai telah mendapat ijin atau persetujuan secara tertulis dari DPC partai di daerah pemilihan sebagai bakal calon kepala daerah
- 3) Sanggup memberdayakan potensi partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita partai yang dituangkan dalam suatu program, tertulis
- 4) Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan ideology PKB
- 5) Tidak pernah terpidana dan terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung
- 6) Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil dan bebas KKN
- 7) Mendapat dukungan ril dari masyarakat secara tertulis sekurang kurangnya 1.000 dukungan di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Didalam proses pencalonan kepala daerah di partai PKB ada bebarap tahap yang dilakukan

- 1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan oleh PKB yaitu membentuk sebuah tim yang bertugas sebagai penjaring dan penyaring. Setelah terbentuk tim tersebut membuka penjangkaran untuk siapa saja yang ingin mendaftar baik di internal partai maupun di eksternal partai.

## 2) Tahap pendaftaran

Para calon diberikan formulir pendaftaran untuk kemudian di isi sesuai data dan informasi tentang calon. Tim yang sudah dibentuk ketika tahap persiapan menetapkan tata cara dan syarat pendaftaran, adapun cara dan syarat itu yaitu:

- a. Para calon mendaftar langsung kepada tim pendaftaran
- b. Bakal calon harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan DPW
- c. Mengambil formulir yang telah disiapkan, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia dan menerima tanda buku pendaftaran
- d. Membayar biaya administrasi yang akan ditetapkan
- e. Menyerahkan dokumen dan kelengkapan sebanyak rangkap lima (5)

## 3) Tahap Verifikasi

Tahap verifikasi ini untuk menjamin seleksi secara transparan dengan dasar criteria yang ditetapkan partai PKB di setiap pengurus partai pada masing-masing tingkatan partai

4) Interview

Interview dilakukan oleh ketua DPC, sekretaris DPC. Diharapkan bias melihat dan menimbang kualitas dan kapabilitas dari bakal calon.

5) Tahap seleksi khusus

Pada tahap seleksi khusus ini PKB melakukan kegiatan survey dan pengkajian terhadap bakal calon, dalam tahap seleksi dilakukannya uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper text) dalam rangka mengetahui tingkat elektabilitas bakal calon

6) Penetapan calon kepala daerah dilakukan melauli rapat kerja partai., yang terdiri atas rapat kerja cabang, yang diadakan untuki menyaring bakal calon yang telah di verifikasi. Pengambilan keputusan menetapkan calon dilakukan oleh DPP PKB.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> No. 76/Juklak/DPW.PKB/X/2015

## 2. Penetapan Calon Walikota Dalam Koalisi

Didalam perhelatan pilkada dikota Tangerang, para bakal calon mulai gencar bersosialisme terhadap masyarakat dan menjalin komunikasi terhadap partai-partai. Partai politik sebagai sebuah kendaraan politik tentu menjadi barometer untuk bakal calon melancarkan niat dan ambisinya. koalisi partai politik yang mendukung pasangan Arif-Sachrudin adalah Partai Demokrat, partai Gerindra, dan PKB. Didalam persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik, dalam mengajukan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang, harus memperoleh paling sedikit 15% perolehan kursi dari 50 kursi pada DPRD kota Tangerang hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu paling sedikit 8 kursi.<sup>17</sup>

PKB yang hanya mendapat 4 kursi di DPRD tidak cukup untuk mencalonkan kepala daerah, begitu pula dengan Partai Gerindra yang hanya memperoleh 5 kursi di DPRD, beda dengan Partai Demokrat yang memperoleh 13 kursi, dalam hal ini sebenarnya Partai Demokrat sudah dapat mencalonkan tunggal, tetapi dalam kenyataannya Partai Demokrat lebih menunggu siapa yang akan dicalonkan oleh partai Demokrat, dalam wawancara penulis dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Bapak Baehaqi, dalam keterangannya sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> KPU Kota Tangerang, No. 272/KPU-Kota.015.436421/V/2013



“Ada berapa nama bakal calon yang mendaftar ke Partai Demokrat, bakal calon yang mendaftar yaitu Abdul Syukur, Harry Mulya Zein, maka dari ini DPC Demokrat Kota Tangerang menunggu hasil perifikasi DPP.”<sup>18</sup>

Sebelumnya partai Gerindra menentukan dukungan terhadap Harry Mulya Zein<sup>19</sup>, dengan keluarnya Surat rekomendasi dari DPP maka dari itu DPC Partai Gerindra berkoordinasi dengan PAC se kota Tangerang untuk menyamakan persepsi mendukung secara totalitas Arief sebagai calon walikota Tangerang.<sup>20</sup> Dengan beralihnya dukungan ke Arief disetujui seluruh pengurus Partai Gerindra dan disepakati oleh seluruh DPC hingga pengurus PAC.

### 3. Peta Kekuatan Koalisi Partai Politik

Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak terlepas dari yang namanya dinamika. Pilkada dikota Tangerang pada tahun 2013 terdapat 5 pasangan calon yaitu no urut 1 Harry Mulya Zain (MHZ) berpasangan dengan Iskandar yang diusung oleh PPP, PKNU, Partai Hanura, no urut 2 Abdul Syukur berpasangan dengan Hilmi Fuad, yang diusung Partai Golkar, PKS, PKPB, PNN, PPI, no urut 3 Dedi Gumelar/Miing berpasangan dengan Suratno, yang diusung oleh PDIP dan PAN, no urut 4 Ahmad Maju Kodri (AMK) berpasangan dengan Gatot Suprijanto yang

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan kerua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Bapak Baehaqi di Citra gading pada tanggal 17 Agustus 2017

<sup>19</sup> Rekomendasi, No. 09-254/PILKADA/DPP-GERINDRA/2012

<sup>20</sup> Rekomendasi, No. 05-0329/PILKADA/DPP-GERINDRA/2013

diusung oleh Partai Buruh, PPNUI, PPRN, PKPI, PBR, Partai Damai Sejahtera dan 16 Parpol Non Parlemen, no urut 5 Arif R Wismansyah berpasangan dengan Sachrudin yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKB..

Sebanyak 1.161.855 warga kota tangerang akan menggunakan hak pilihnya pada 31 Agustus 2013. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang sebagai penyelenggara mengadakan persiapan yang diawali dengan pembentukan, pengangkatan, dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih pada 2 Februari - 1 Juni 2013. KPU Kota Tangerang pada tanggal 13 Juni 2013 akan menentukan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dari ke lima bakal calon yang mendaftar ke KPUD Kota Tangerang 2 diantaranya yang aman dari partai pengusung yaitu, Abdul Syukur dari partai Golkar, Hilmi Fuad bakal calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang aman. Sementara PDI Perjuangan yang memenuhi kuota kursi di parlemen, megusung TB Dedy gumelar atau miing yang berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan mngusung Soeratno, sebagai Wakil Miing Pada bakal calon walikota dan wakil walikota Tangerang, sementara dari hasil verifikasi, pasangan Ahmad Madju Kodri - Gatot dan Hary Mulya Zein - Iskandar dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. AMK dan Gatot mempunyai permasalahan

kepengurusan dan surat rekomendasi partai pengusung, sedangkan HMZ dan Iskandar dukungan Partai Gerindra nya tidak sah karena Partai Gerindra sudah memberikan dukungannya terhadap pasangan Arief R Wismansyah dan Sachrudin.

Dari hasil rapat Pleno KPUD Kota Tangerang menetapkan 3 pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lolos yaitu HMZ dan Iskandar, Abdu Syukur dan Hilmi Fuad, TB S Gumelar dan Suratno dinyatakan lolos. Sedangkan 2 pasangan lainnya yaitu Arief R Wismansyah dan Sachrudin, AMK dan Gatot dinyatakan tidak lolos. Pasangan Arief-Sachrudin dinyatakan tidak lolos dikarenakan Sachrudin yang menjabat sebagai camat pinang yang tidak menyertakan surat izin dari walikota Kota Tangerang untuk Pilwalkot 2013. Sedangkan AMK dan Gatot tidak memenuhi syarat 15% suara di parlemen dikarekankan Partai Hanura menarik dukungannya, dan mendukung pasangan HMZ dan Iskandar.

Dalam hal ini Arief-Sachrudin dan HMZ-Iskandar menggugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan di ambil alihnya tugas KPUD Kota Tagerang ke KPUD Banten disitulah dikembalikannya hak Konstitusional sebagai Pasangan calon walikota dan calon walikota. .

Didalam peraturan pencalonan bakal calon partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 15% dari jumlah kursi DPRD. Pada pemilu legislatif 9 April 2009 ada 38 partai politik Nasional

dan 6 Partai Lokal Aceh, partai politik yang mengikuti pemilu legislatif akan merebutkan 50 kursi di DPRD tingkat II di Kota Tangerang.

Perolehan Kursi Partai politik di DPRD

kota Tangerang 2009-2014<sup>21</sup>

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Presentase
1	Partai Demokrat	13	26%
2	Partai Golkar	6	12%
3	PKS	6	12%
4	PPP	5	10%
5	PDIP	5	10%
6	Partai Gerindra	5	10%
7	PAN	4	8%
8	PKB	3	6%
9	Hanura	2	4%
10	PKNU	1	2%

Sumber: KPUD Kota Tangerang

Dalam hal ini yang pasangan walikota dan wakil walikota yang memiliki peluang dalam memenangkan pilkada yaitu no urut 2, pasangan Abdul Syukur dan Hilmi fuad, dikarenakan Golkar memiliki 6 Kursi

---

<sup>21</sup> Rekapitulasi KPUD Kota Tangerang, Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009

dengan presentase 12% sama halnya dengan PKS memiliki 6 Kursi dengan Presentase 12 %.

Sedangkan no urut 1, PPP memiliki 5 kursi dengan presentase 10%, Partai Hanura memiliki 2 kursi dengan presentase 4 %, no urut 3 yang diusung partai PDIP dan PAN, PDIP yang memiliki 5 kursi dengan presentase 10% sedangkan PAN memiliki 4 kursi dengan presentase 8%, sedangkan no urut 5, diusung oleh 3 partai, Partai Demokrat memiliki 13 kursi dengan presentase 26%, Partai Gerindra Memiliki 5 kursi dengan Presentase 10% dan PKB memiliki 3 kursi dengan presentase 6%. Jika dilihat, bahwa pasangan no urut 2 lebih berpeluang besar dalam memenangkan pilkada dengan jumlah 12 kursi di DPRD.